



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA DI KABUPATEN PURWAKARTA

**Fitra Haldi Pratama<sup>1)</sup>, Agustina Setiawan<sup>2)</sup>, Arlan Siddha<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terus menerus akan mengakibatkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul akibat dari kenaikan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya yaitu menyangkut permasalahan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Purwakarta, dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan masih belum optimal hal ini karena masih terdapat berbagai pemasalahan seperti berikut. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam komunikasi belum berjalan dengan baik ini dikarenakan Kontainer sampah belum disediakan di semua area, mengindikasikan adanya keterbatasan dalam distribusi atau kebijakan sebelumnya yang mengarahkan pengelolaan sampah dengan metode lain.

**Kata Kunci:** **Implementasi Kebijakan, Tempat Pembuangan Sampah Sementara**

### Abstract

*Every year the population of Indonesia experiences a significant increase, with the continuous increase in population this will result in various problems. The problem that arises as a result of the increase in population which continues to increase every year is related to the problem of waste. In this research, researchers used qualitative research methods, with a descriptive approach. Where the data collected is in the form of data obtained through interviews, field observations, documents or notes and other official documents that support the research. Based on the results of research conducted by researchers regarding Policy Implementation by the Environmental Service in Overcoming Dump Sites Temporary Waste in Purwakarta Regency. In its implementation it has not been fully effective and efficient. Based on the results of research conducted by researchers regarding Policy Implementation by the Environmental Service in Handling Temporary Waste Disposal Sites in Purwakarta*

*Regency. in its implementation it has not been fully effective and efficient. Therefore, it can be concluded that the coordination process carried out is still not optimal because there are still various problems such as the following. Based on the results of field observations and interviews, researchers can conclude that communication has not gone well because waste containers have not been provided in all areas, indicating that there are limitations in distribution or previous policies that directed waste management using other methods.*

**Keywords: Policy Implementation, Temporary Waste Disposal Site**

## **PENDAHULUAN**

Dalam mengatasi permasalahan sampah ini diperlukan adanya kesadaran dari pemerintah dan juga masyarakat agar dapat terlepas dari permasalahan tersebut. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta penduduk itu menghasilkan total keseluruhan sampah yang mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kg per orang (Nita dkk, 2022). Dari data statistik sampah di Indonesia, Indonesia menempati negara penghasil sampah terbanyak terutama sampah berjenis plastik dan menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Ini merupakan permasalahan yang cukup serius dan penting, apabila permasalahan ini belum menemukan solusi dan belum dapat mencapai titik terang maka jumlah sampah di Indonesia akan terus meningkat jika dalam penanganannya masih belum serius.

Untuk saat ini permasalahan mengenai sampah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan menjadi topik utama dalam masalah sosial, ekonomi serta budaya. Oleh sebab itu Indonesia sudah berupaya dengan melakukan berbagai program dalam menanggulangi masalah sampah seperti kebijakan dari Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Ruang Lingkup Sampah Yang Dikelola dalam mengelola sampah terkait pengurangan dan penanganan sampah, dimana dalam pengelolaan sampah itu seharusnya sudah dikelola sejak pertama masuk dari sumbernya, mulai dari perjalanan sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Walaupun sudah mengeluarkan Undang-Undang mengenai pengelolaan sampah, tetapi dalam pelaksanaannya masih seputar membuang sampah ke dalam tong sampah, lalu petugas kebersihan akan membawa sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) kemudian dilanjutkan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dengan pengelolaan sampah

seperti itu pelaksanaan dalam mengelola sampah tidak akan bekerja secara efektif dan efisien terutama dalam mengurangi sampah dari sumbernya (sampah rumah tangga).

Dalam mengelola sampah Kabupaten Purwakarta yang merupakan salah satu daerah penghasil timbunan sampah dengan volume yang mencapai 580 ton/hari yang berasal dari 17 Kecamatan yang di Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi permasalahan tersebut mengacu kepada kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 mengenai pengelolaan sampah. Ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Purwakarta yang memiliki dampak untuk kesehatan lingkungan masyarakat. Tetapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih belum mencapai hasil yang maksimal dan belum berjalan dengan baik.

Kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 pasal 7 mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya komunikasi, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ada di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bersama masyarakat. Dan semua hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kebijakan juga tidak terlepas dari masalah sumber daya dan kepegawaian pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sehingga membuat proses implementasi kebijakan mengalami kendala.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan deskriptif. Dimana data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi di lapangan, dokumen atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang mendukung dalam penelitian.

Menurut Sugiyono dikutip dalam Harbani Pasolong (2013:161) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan sebuah

metode penelitian yang biasa digunakan dalam meneliti suatu objek yang bersifat alamiah, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang bersifat induktif serta hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Kemudian menurut Krik dan Miller dalam Moleong (2010:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Tujuan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah supaya peneliti dapat menjelaskan gambaran yang nyata mengenai Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam menanggulangi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Purwakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif, menurut Artwar Bajari (2015:46) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara tepat dan akurat mengenai sifat dari suatu individu, keadaan, gejala dari suatu kelompok tertentu. Oleh karena itu peneliti disini mencari fakta atau kebenaran mengenai Dinas Lingkungan Hidup Dalam menanggulangi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Purwakarta secara mendalam dan detail serta mempelajari apa saja masalah yang terjadi di lapangan secara langsung.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya efektif. Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini adalah kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak terkait lainnya, seperti kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan sampah. Koordinasi yang kurang baik berdampak pada kelancaran distribusi kontainer sampah dan ketidakmerataan penyediaan TPS di beberapa daerah. Selain itu, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait

menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah juga belum berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari belum disediakannya kontainer sampah di seluruh area yang membutuhkan, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam distribusi dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh.

**Faktor Penyebab:**

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Salah satu penyebab utama dari tidak optimalnya implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menghadapi kesulitan dalam menyediakan kontainer sampah di semua wilayah, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau memiliki infrastruktur yang kurang memadai.
2. **Ketidaksesuaian Metode Pengelolaan Sampah:** Kebijakan pengelolaan sampah sebelumnya lebih mengedepankan metode pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, namun penerapannya tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diharapkan dengan kondisi lapangan yang ada, di mana masyarakat belum sepenuhnya terbiasa dengan metode pemilahan sampah.
3. **Kurangnya Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat:** Proses sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan masih kurang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Untuk menghadapi masalah ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta perlu memperbaiki koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan kepada petugas pengelola sampah di tingkat kelurahan dan desa, serta

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Selain itu, penting untuk meninjau kembali kebijakan yang ada, terutama dalam hal distribusi kontainer sampah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap wilayah, baik yang padat penduduk maupun yang terpencil, mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen sampah yang lebih modern dapat menjadi solusi yang lebih efisien. Implementasi kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Purwakarta belum berjalan secara optimal. Masih ada berbagai masalah yang menghambat efektivitas kebijakan ini, terutama terkait dengan koordinasi, distribusi kontainer sampah, dan komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah ini, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Komunikasi dalam pemerintahan merupakan inti dari fungsi pemerintah yang efektif dan efisien. Ini melibatkan aliran informasi, pesan, dan arahan antara berbagai level pemerintahan, departemen, lembaga, serta antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang baik menjadi fondasi bagi proses pengambilan keputusan yang tepat, implementasi kebijakan yang sukses, dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya. Seperti Komunikasi Internal melibatkan aliran informasi dan pesan di dalam struktur pemerintahan itu sendiri, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah dan lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bagian dari pemerintahan memiliki akses ke informasi yang relevan, baik untuk tujuan pengambilan keputusan maupun koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dalam sudut pandang pemerintahan merujuk pada segala hal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik itu dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, atau politik. Sumber daya dalam pemerintahan meliputi berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, keuangan, teknologi, alam, hingga struktur organisasi dan kelembagaan. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam pemerintahan. Ini mencakup

keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu yang bekerja dalam berbagai lembaga pemerintah.

Disposisi merupakan sikap, kecenderungan, atau orientasi mental yang dimiliki oleh individu atau lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Disposisi merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku dan keputusan dalam konteks administrasi publik, karena memengaruhi cara individu atau lembaga memahami, menafsirkan, dan merespons situasi-situasi yang dihadapi.

Struktur birokrasi pada organisasi atau tata kelola pemerintahan yang terstruktur secara hierarkis dan fungsional untuk menjalankan berbagai tugas administratif dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur birokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, koordinasi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam pengambilan keputusan. Struktur birokrasi biasanya didasarkan pada prinsip hierarki, di mana ada tingkatan-tingkatan kekuasaan dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab antara unit-unit organisasi berbeda serta antara tingkatan hierarki yang berbeda.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang bisa penulis tarik berdasarkan hasil mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian menganalisis data sesuai dengan aktivitas yang telah ditentukan serta menguji keabsahan data yang peneliti paparkan, maka secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tempat Pembuangan Sampah Sementara Di Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya efektif dan efisien. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan masih belum optimal hal ini karena masih terdapat berbagai pemasalahan seperti berikut:

Komunikasi, Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam komunikasi belum berjalan dengan baik hal ini diakarenakan kontainer sampah belum disediakan di semua area, mengindikasikan adanya keterbatasan dalam distribusi atau kebijakan sebelumnya yang mengarahkan pengelolaan sampah dengan metode lain. Sumberdaya, Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam sumberdaya sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada cukup banyak tenaga kerja dan kendaraan yang memadai, kabupaten ini masih mengalami kekurangan kendaraan pengangkut sampah untuk melayani seluruh wilayah dengan

efektif. Disposisi, Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam disposisi sudah berjalan dengan baik. Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta telah dirancang dengan baik oleh para ahli yang berpengalaman, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan sampah secara serius. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki peran sentral sebagai pelaksana utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Daerah (Perda), dan keputusan Bupati. Struktur birokrasi, Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam disposisi sudah berjalan dengan baik dikarenakan Personil pegawai diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan administrasi dan operasional. Di lapangan, pelaksanaan SOP dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaksana. Namun, ada ketidakpastian mengenai bagaimana masyarakat menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap SOP tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan internal dan persepsi eksternal dari masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AbdulWahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bajari, Atwar. 2015. Metode Penelitian Komunikasi, Prosedur, Trend dan Etika. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Moeleong, Loxy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik, Cetakan Ketujuh, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*.
- Juliawan, Jerri. 2016. *Studi Arahan Pengembangan Pengelolaan Sampah (3R) Berbasis Masyarakat Di Kawasan Perkotaan Kecamatan Purwakarta*

Kharis, Zulfikar. Eka Wardhani. Dwi Prasetyanto. 2022. *Penerapan Konsep 3R Dan Optimasi Rute Pengangkuran Sampah Dengan Metode Saving Matriks Di Kecamatan Purwakarta Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Vol. 7 No. 3

Mubarakh, Farhan Azis, dkk. 2021. *Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 12, No. 2

Nurliawati, Nita. Endang Wirjatmi Tri Lestari. 2022. *Evaluasi Kebijakan Persampahan Di Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 3 No. 1Syafiee, Kencana Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Nurwulan. Riany Laila. Mariane. 2023. *PKM Pemberdayaan Kelompok PKK Melalui Program Pengelolaan Sampah Di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta* Syahruddin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Hikam Media Utama

Rumaisa, Dewi. 2019. *Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)*. Jurnal Hukum Media Bhakti

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung

Wahdatunisa, Mahda. 2019. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 2 Yogyakarta: CAP